



Pemkab Diminta Transparan Isi Perkada APBD

Amurang, KOMENTAR

APBD lewat Peraturan kepada daerah (Perkada), sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati. Ini lantaran proses penyusunan tidak melibatkan DPRD. Sehingga prosesnya dapat dikatakan tidak ada pengawasan dari masyarakat. Karena itu Bupati Minsel Tetty Paruntu yang telah menandatangani Perkada APBD dimintakan dapat transparan kepada publik.

"Kan ada yang mengatakan bahwa Gubernur harus jujur dan transparan mengenai syarat dokumen pengajuan Perkada. Nah sebaliknya bupati juga harus melakukan hal yang sama, jujur dan terbuka dengan draf APBD-nya. Ingat APBD Perkada tidak disusun atau dibahas bersama DPRD yang merupakan representasi rakyat. Apalagi kalau sampai benar informasi yang mengatakan Pemprov

Sulut belum menyetujukannya," sebut Jhon Senduk dari pemerhati korupsi Minsel.

Dia juga mengatakan langkah terburu-buru Pemkab Minsel mengeluarkan Perkada bukan tidak mungkin dikarenakan adanya anggaran fantastis dan program yang justru tidak pro rakyat. Bahkan juga kemungkinan program yang hanya menghambur-hamburkan anggaran tanpa mempertimbangkan out put bagi masyarakat. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada.

"Kita sudah ada pengalaman, sedangkan dibahas bersama DPRD saja ada program yang tidak jelas out putnya sehingga mubazir. Bisa saya ambil contoh proyek green house dan destilas air laut. Sampai sekarang kedua proyek yang menelan anggaran puluhan miliar tidak dipergunakan sehingga dikarakan mubazir. Nah bukan tidak

mungkin yang seperti ini juga kembali tertata di APBD Perkada," tukas ketua GMPK Minsel tersebut.

Dia juga mengingatkan bahwa APBD harus disusun dengan menyesuaikan RP-JMD yang telah disusun juga pada KUA PPAS. Kalau ada yang tidak, kemudian ditata maka telah terjadi pelanggaran. Makanya transparansi sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut bersaing. Jangan menutup-nutupi sebab uang yang ditata adalah milik rakyat dimana sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

"Kalau memang sudah sesuai, kenapa enggan transparan. Jangan sampai APBD disusun demi kepentingan kontestasi Pilkada. Supaya semua jelas dan pengawasan berjalan dengan baik. Kan di DKI terbongkarnya anggaran-anggaran tak masuk di akan lantaran transparansi," kuncinya.^(vtr)